

## **REVITALISASI WARISAN BUDAYA ACEH UNTUK PEMAHAMAN LINTAS BUDAYA DAN PARIWISATA DI KABUPATEN BIREUEN ACEH-INDONESIA**

*(Revitalization of Acehese Cultural Heritage for Cross Cultural Understanding and Tourism in Bireuen Aceh-Indonesia)*

Iswadi<sup>1\*)</sup>, Rahmad<sup>2)</sup>, Reza Fitria<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Al-Muslim, Bireuen, Provinsi Aceh, 24267

<sup>2)</sup>Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Al-Muslim, Bireuen, Provinsi Aceh, 24267

<sup>3)</sup>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, 24267

---

### **Article Info:**

Received: 10 Juni 2022

Accepted: 14 Juli 2022

### **Keywords:**

Acehnese; cultural; heritage; revitalization; tourism

### **Corresponding Author:**

Iswadi

Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Al-Muslim, Bireuen, Provinsi Aceh, 24267. Tel: +6285260291404

Email:

[iswaditajmorawa@gmail.com](mailto:iswaditajmorawa@gmail.com)

**Abstrak**, Artikel penelitian ini berkenaan dengan warisan budaya Aceh yang selama ini tampaknya antara ada dan tiada. Aceh hingga saat ini seolah-olah bagaikan potret hitam sebagai akibat dari konflik berkepanjangan. Demikian juga halnya dengan warisan budaya Aceh tampaknya telah dipandang tidak begitu penting lagi dan berubah menjadi cara pandang yang berorientasi ekonomi dan bisnis. Ironisnya lagi bahwa berbagai kearifan lokal yang ada juga tidak lagi menjadi acuan pembelajaran tentang nilai-nilai di tengah-tengah masyarakat Aceh pada umumnya. Sehingga tidak heran jika muncul persepsi negatif tentang Aceh yang berasal dari masyarakat luar Aceh. Disinilah perlunya pemahaman lintas budaya melalui revitalisasi warisan budaya Aceh yang juga akan berguna dalam pengembangan pariwisata Aceh pasca konflik dan tsunami. Artikel ini merupakan penelitian yang menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif dimana data-data yang ada diperoleh melalui berbagai sumber kepustakaan, internet, desk observation, interview, dan lain sebagainya. Selanjutnya berbagai data yang relevan diolah dan hasilnya dipaparkan secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perlunya revitalisasi warisan budaya Aceh dengan melakukan pemetaan dan kajian, serta pencatatan berbagai warisan Aceh sebagai kekayaan budaya baik berupa warisan budaya fisik maupun non fisik. Selanjutnya adalah revitalisasi berbagai kearifan lokal yang berbasis syariat Islam, dan perlunya pemahaman lintas budaya sebagai upaya mengembalikan harkat dan martabat keAcehan yang hilang, serta menjadikan berbagai kearifan yang terpotret melalui warisan budaya Aceh sebagai sesuatu yang menarik dan berpotensi dalam pengembangan pariwisata Aceh pasca konflik dan tsunami.

**Abstract**, this research article deals with Acehese cultural heritage which so far seems to exist or not. Aceh until now seems like a black portrait as a result of the prolonged conflict. Likewise, Acehese cultural heritage seems to have been seen as less important and turned into an economic and business-oriented perspective. The irony is that the various local wisdoms that exist are no longer a reference for learning about values in the midst of Acehese society in general. So do not be surprised if there is a negative perception about Aceh that comes from people outside Aceh. This is where the need for cross-cultural understanding comes from through the revitalization of Acehese cultural heritage which will also be useful in the development of tourism in Aceh after the conflict and tsunami. This article is a research that uses a qualitative descriptive research methodology where the existing data is obtained through various library sources, the internet, desk observation, interviews, and so on. Furthermore, the

*various relevant data are processed and the results are presented in a descriptive-qualitative manner. The results of the study indicate the need to revitalize Acehese cultural heritage by conducting mapping and studies, as well as recording various Acehese heritages as cultural wealth in the form of physical and non-physical cultural heritage. Next is the revitalization of various local wisdoms based on Islamic law, and the need for cross-cultural understanding as an effort to restore the lost dignity of Aceh, as well as making various wisdoms portrayed through Acehese cultural heritage as something interesting and potential in the development of Aceh tourism after the conflict and tsunami.*

## **PENDAHULUAN**

Ketika lahir sebuah negara bangsa (nation state) di berbagai belahan dunia ini, maka pada saat itu pulalah secara langsung akan lahir warga bangsanya (state nation) yang substansinya adalah berasal dari warga etnis yang memang sudah ada jauh sebelum lahirnya sebuah negara bangsa itu sendiri (Eriksen 2002). Indonesia misalnya adalah sebuah negara bangsa yang ada sejak tahun 1945 dimana warga bangsanya pada hakikatnya adalah warga dari berbagai kelompok etnik yang dilekatkan secara langsung sebagai wargabangsa Indonesia. Demikian juga halnya dengan berbagai kebudayaan etnik yang ada juga disebut sebagai kebudayaan Indonesia. Bahasa Melayu misalnya, sebagai produk kebudayaan (artefact) miliknya warga etnis Melayu juga telah dinyatakan sebagai bahasa nasional Indonesia. Demikian juga seterusnya dengan berbagai produk budaya lainnya seperti karya sastranya, tari, serta berbagai berbagai produk kesenian tradisional lainnya (Meuleman 2005). Dengan kata lain bahwa semuanya harus dilebur ke dalam satu nama yakni Indonesia guna penguatan terhadap politik nasional Indonesia. Namun dalam kenyataannya bahwa hingga saat ini, masih banyak kelompok-kelompok etnik yang justru masih memiliki kekuatan budaya ditengah-tengah hegemoni politik nasional dan bahkan global. Diantaranya adalah kelompok etnik Aceh dimana masyarakat Aceh sembilan puluh persen pada umumnya masih menggunakan bahasa Aceh, dan dikenal memiliki berbagai tradisi keAcehan, serta kearifan lokal (local wisdom) yang berbasis syariah Islam. Sayangnya sejak 1976 lebih dari 30 tahun Aceh telah didudukkan sebagai wilayah konflik berkepanjangan, disusul dengan gempa bumi dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 dan telah membuat Aceh lebih terasa porak-poranda (Pirous 2005).

Aceh pada dasarnya tidak hanya memiliki kekuatan budaya, akan tetapi juga memiliki kekuatan politik yang ditandai dengan keinginan politik (political will) untuk mendirikan sebuah negara bangsa sendiri berbasis keislaman dan berbasis etnis (Ilhamsyah 2018). Maknanya bahwa secara kultural Aceh bukanlah Indonesia, namun secara politik Aceh dipandang sebagai bagian integral dari negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Lebih lanjut, kekuatan politik nasional Indonesia tampaknya telah menghegemoni Aceh yang berdampak pada kehancuran yang tidak hanya kehancuran sosial, politik, ekonomi, akan tetapi juga kehancuran budaya, serta kehancuran peradaban di tengah-tengah masyarakat Aceh pada umumnya pasca konflik dan tsunami.

Kehancuran politik dan ekonomi yang tidak stabil dan ditambah lagi dengan bencana alam, maka di dalam situasi dan kondisi seperti inilah juga telah terjadi perubahan pola berpikir masyarakat Aceh yang cenderung menjadi pragmatik. Berbagai warisan budaya Aceh yang merefleksikan berbagai nilai-nilai kearifan dipandang tidak begitu penting dibandingkan dengan persoalan ekonomi yang dapat menghasilkan uang dengan cepat. Dengan kata lain bahwa telah terjadi pola berpikir yang berorientasi pada uang. Tidak heran jika telah terjadi perilaku budaya manipulatif dan koruptif yang tidak lagi berorientasi pada nilai-nilai. Artinya bahwa uang telah menjadi tujuan hidup dan dipandang sebagai sesuatu pemecahan masalah yang paling praktis dan aman (Rosana 2015).

Masyarakat yang masih memikirkan tentang warisan budaya sebagai refleksi nilai-nilai dianggap sebagai sesuatu pekerjaan yang tidak akan pernah menghasilkan apapun. Hal inilah barangkali salah satu yang menyebabkan warisan budaya Aceh telah beralih fungsi seperti halnya rumah tradisional Aceh misalnya, telah berubah menjadi "rumah politik" dan "rumah bisnis". Sehingga daripada kita membangun rumah yang berarsitektur rumah tradisional Aceh, lebih baik kita membangun "ruko" (rumah toko) dimana kita dapat tinggal di lantai 2, sementara di lantai 1 dapat digunakan untuk warung kopi dan berbagai bisnis lainnya. Lebih lanjut dapat dibayangkan bahwa jika suatu saat nanti tidak ada lagi rumah tradisional Aceh di tengah-tengah masyarakatnya, tidak terdengar lagi suara *rapa'i, ranup lampuan, saman, seudati, dan serune kale* misalnya, maka Aceh tentunya akan tampak seperti sebuah negeri tanpa identitas budaya (Haboddin 2012).

Warisan budaya Aceh hingga saat ini tampak seperti sebuah potret hitam masa lampau. Setelah adanya perjanjian Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 dimana Aceh adalah bagian integral dari sebuah negara bangsa Indonesia, tampaknya masyarakat Aceh justru lebih tidak jelas lagi identitas budayanya. Mereka hidup dalam dualisme antara mempertahankan sisa-sisa warisan budayanya yang masih ada, atau larut dalam kekuatan politik nasional melalui berbagai kebijakan publik yang belum tentu sesuai dengan pandangan dunia keAcehan (Acehnese worldview). Oleh karena itulah perlu dilakukan revitalisasi terhadap berbagai warisan budaya Aceh dengan mengembalikan sepenuhnya kepada pemilik warisan budaya yang syah yakni masyarakat Aceh tanpa intervensi politik kepentingan. Perlu disadari bahwa budaya dan agama berkenaan dengan nilai-nilai (values), sedangkan politik selalu berkaitan dengan kepentingan (interest), sementara ekonomi dan bisnis berkenaan dengan keuntungan (Sulistyaningtyas 2007).

Revitalisasi warisan budaya Aceh juga dalam rangka pentingnya nilai-nilai yang tidak hanya berguna bagi kelompok etnik Aceh, akan tetapi juga berguna dalam pemahaman lintas budaya (cross cultural understanding) agar kita dapat saling menghormati sesuai dengan syariah Islam bahwa Allah ciptakan manusia bersuku-suku, berpuak-puak, berbangsa-bangsa untuk saling kenal-mengenal (Al Qur'an, surah al hujurat: 13). Bukan saling memperolok-olok, saling merendahkan, dan bahkan saling melakukan penjajahan di negeri sendiri, karena itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan. Maknanya bahwa revitalisasi nilai-nilai perlu dilakukan agar stereotype negative tentang Aceh tidak terulang kembali seperti kata-kata Aceh *pungo* misalnya, pemberontak, separatis, hingga ladang ganja nomor satu di dunia, dan seterusnya yang semuanya ini tidak hanya merugikan orang Aceh akan tetapi juga merugikan masyarakat dunia yang akan berkunjung ke Aceh sebagai kunjungan wisata, dimana Aceh masih dianggap sangat mencekam dan mengerikan. Itulah sebabnya artikel penelitian ini bertajuk :*Revitalisasi Warisan Budaya Aceh untuk Pemahaman Lintas Budaya dan Pariwisata di Kabupaten Bireuen Aceh-Indonesia*.

## **METODOLOGI**

Artikel penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dimana data-data yang dikumpulkan dan diolah secara kualitatif. Lebih lanjut dari hasil pengolahan data dipaparkan secara deskriptif. Berbagai data yang dikumpulkan diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) berupa buku-buku, journal, interview, dan juga melalui akses internet (desk observation). Setelah dilakukan pengumpulan data, lebih lanjut dilakukan pengelompokan data sesuai dengan permasalahan dalam tajuk penelitian, guna memudahkan dalam analisis data yang diperlukan. Selanjutnya dari hasil analisis data, dipaparkan dalam poin-poin yang ada sebagai bahagian sub-chapter dari chapter hasil dan pembahasan. Setelah itu, dilakukan kesimpulan yakni berupa kesimpulan dari hasil dan pembahasan secara keseluruhan. Langkah selanjutnya sebagai langkah terakhir adalah melakukan *revising* dan *editing* guna keperluan publikasi baik pada jurnal lokal, nasional, maupun internasional.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### *Pemetaan dan Kajian Budaya Sebagai Upaya Revitalisasi Warisan Budaya Aceh*

Bagi masyarakat yang berasal dari luar Aceh, tampaknya hingga saat ini masih cenderung memandang orang Aceh adalah orang kaya secara ekonomi (Pirous 2005). Namun secara kultural tampaknya masih perlu perenungan kembali dimana aktivitas kebudayaan di Aceh dapat dikatakan tidak ada dibandingkan dengan aktivitas ekonomi khususnya di kabupaten Bireuen pasca konflik dan tsunami. Hal ini disebabkan karena setiap aktivitas kebudayaan juga selalu dikaitkan dengan syariah Islam, ditambah lagi dengan situasi pandemi COVID 19. Tidak hanya itu, aktivitas kebudayaan masih dipandang hanya sebagai hiburan saja yakni tontonan yang tidak memberikan tuntunan. Dengan kata lain bahwa aktivitas budaya masih dianggap sebagai aktivitas yang hanya membawa mudharat daripada manfaat. Cara berfikir seperti inilah yang perlu diluruskan melalui kajian budaya yakni kajian yang berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan manusia sebagaimana terpotret di dalam warisan budayanya.

Warisan budaya Aceh sudah seharusnya dipahami oleh masyarakat Aceh sebagai ahli waris yang syah sebagai peninggalan nenek moyang terdahulu untuk pembelajaran masa kini dan masa yang akan datang. Namun didalam realita faktual yang dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat Aceh, tampaknya mereka tidak menyadari bahwa orang Aceh memang tidak hanya kaya secara ekonomi, akan tetapi juga kaya secara kultural. Sayangnya sebagian besar masyarakat Aceh pada umumnya tidak mengetahui bentuk-bentuk kekayaan budaya mereka, dimana lokasi kekayaan itu, dan untuk apa. Hal ini terjadi karena kita

tampaknya telah dikondisikan sebagai masyarakat yang disibukkan untuk mencari kekayaan material dan uang, dan bukan kekayaan yang bersifat nilai-nilai (values).

Tidak heran jika kekuatan kebudayaan semakin hari, minggu, bulan, dan bahkan bertahun-tahun tampak lemah karena pada hakikatnya telah terhegemoni oleh kekuatan ekonomi dan kekuatan politik kekuasaan yang ada. Padahal pembangunan kebudayaan tidak kalah pentingnya dibanding dengan pembangunan politik dan ekonomi. Apa yang dimaksud dengan pembangunan kebudayaan disini adalah pembangunan yang berbasis pada sistem nilai-nilai yang luhur, dan nilai-nilai itu biasanya terpotret melalui warisan budayanya. Oleh karena itulah revitalisasi terhadap warisan budaya Aceh perlu dilakukan dengan pendataan kembali berapa jumlah kekayaan budaya yang ada di kabupaten Bireuen misalnya, yang nantinya akan dilanjutkan ke berbagai wilayah kabupaten lainnya. Artinya bahwa selain pendataan jumlah warisan budaya yang ada, juga perlu dilakukan pemetaan lokasi dimana warisan budaya Aceh itu berada dan bagaimana eksistensinya (Ismail 2008).

Selanjutnya perlu dilakukan kajian budaya (cultural studies) terhadap eksistensi benda warisan budaya itu sendiri agar masyarakat mengetahui sejauh mana kebermaknaan warisan budaya Aceh khususnya di dalam kehidupan manusia baik dalam ruang lingkup lokal, nasional, maupun internasional. Sebagai contoh disini kita akan memulainya dari batas wilayah paling barat kabupaten Bireuen Aceh yakni daerah Samalanga misalnya. Di daerah ini terdapat peninggalan makam Tun Sri Lanang seorang sastrawan besar yang hidup sekitar abad 16. Namun meskipun kita berada di wilayah yang sama dengan Tun Sri Lanang, akan tetapi kita tidak pernah mengenalnya dan bahkan mendengar namanya pun tidak pernah. Cukup ironis, sementara para peneliti kebudayaan dari luar Aceh justru merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang karya-karya besar Tun Sri Lanang. Sebab jika kita bandingkan dengan apa yang telah terjadi di Inggris misalnya, pada akhir abad 16 atau pada abad yang sama, di sana juga hidup seorang sastrawan besar yang bernama William Shakespeare yang cukup terkenal di seluruh dunia dengan karya-karya dramanya seperti; *Romeo and Juliet, Macbeth, King Lear, Julius Caesar, Hamlet* dan lain sebagainya. Dari sini tentunya muncul pertanyaan mengapa Tun Sri Lanang yang selevel dengan sastrawan dunia dipandang tidak terkenal dan bahkan tidak dikenal di negeri sendiri ?. Hal ini terjadi karena pada dasarnya kita belum mampu menghargai produk kebudayaan kita sendiri sebagai sesuatu yang bernilai budaya yang tinggi.

Demikian seterusnya jika kita lanjutkan perjalanan kita ke arah timur, kita pun akan menemukan berbagai warisan budaya lainnya. Dari peninggalan sejarah kerajaan Jeumpa misalnya, kerajaan Peusangan, makam Habib Bugak yang berkaitan dengan orang Aceh naik haji, dan lain-lainnya. Bahkan hingga batas wilayah bahagian timur kabupaten Bireuen yakni kecamatan Gandapura, kita masih juga menemukan salah satu produk budaya berupa *Kesenian Tradisional Taktok Bambu Hijau*, yang tentunya dapat dijadikan kajian lebih lanjut. Dengan kata lain bahwa kabupaten Bireuen disini dapat kita jadikan pilot project dalam kaitannya dengan revitalisasi warisan budaya Aceh. Untuk itulah perlu dilakukan pendataan kembali sekaligus pemetaan serta perawatan lebih lanjut. Maknanya bahwa upaya revitalisasi disini adalah membangun kesadaran baru (new consciousness) bahwa ada sesuatu substansi yang penting untuk dapat digunakan sebagai penguatan budaya Aceh yang selama ini substansi itu hilang ditengah-tengah pemilikinya. Tidak heran jika *kesenian tradisional taktok bambu hijau* yang memadukan beberapa unsur seni rupa musik, tari, dan sastra, dengan menggunakan bambu hijau sebagai media alat musik tradisional, perlu juga dicatat sebagai bentuk warisan budaya Aceh di kabupaten Bireuen yang akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemilikinya yakni masyarakat Aceh Bireuen.

#### *Pencatatan atas Hak Kekayaan Warisan Budaya Aceh*

Agar suatu masa kita tidak kehilangan harta warisan budaya yang bernilai di tengah-tengah sebuah negara bangsa Indonesia, maka perlu dilakukan pencatatan atas hak kekayaan warisan budaya Aceh baik warisan budaya benda maupun non benda. Perlu disadari bahwa pemilik yang syah dari warisan budaya etnik adalah masyarakat dari kelompok etnik itu sendiri termasuk juga warisan budaya Aceh. Namun karena etnik Aceh dan juga berbagai kelompok etnik lainnya sudah merupakan bagian integral dari warga bangsa Indonesia, disinilah bukan tidak mungkin akan terjadi pengaburan dan pelemahan terhadap warisan budaya etnik yang ada karena semuanya sudah disebut sebagai kekayaan warisan budaya Indonesia. Tidak heran jika situasi dan kondisi seperti ini juga akan memicu kerusuhan tersendiri yang berdampak pada terjadinya silang sengketa atas hak kepemilikan warisan budaya tertentu. Oleh karena itulah, sudah saatnya pemerintahan dari sebuah negara bangsa itu sendiri dapat mengambil suatu kebijakan publik yang tidak

hanya bersifat politis, akan tetapi juga kebijakan yang bersifat kultural, serta masih berpihak pada substansi warga bangsanya.

Saat ini masih ada juga kasus-kasus yang tidak terselesaikan terkait dengan hak atas kekayaan warisan budaya Aceh. *Tari Saman* misalnya, telah tercatat sebagai salah satu warisan budaya Aceh, dan bahkan tercatat sebagai warisan budaya dunia di UNESCO. Namun bagi masyarakat Gayo telah mengklaim bahwa *tari saman* adalah miliknya orang Gayo dan sebagai salah satu produk kebudayaan Gayo yang dianggap telah dimanipulasi sebagai produk budaya Aceh. Untuk itulah *tari saman* seharusnya ditambahkan dengan kata Gayo dan menjadi *tari saman Gayo* Dan bukan *tari saman Aceh* yang selama ini telah dikenal oleh masyarakat dunia. Bagi masyarakat Gayo tampaknya sudah harga mati bahwa *tari saman* adalah miliknya orang Gayo sebagai ahli waris yang syah. Sementara itu mereka juga telah meluruskan bahwa nama tari *saman* yang ada dalam keterkaitannya sebagai milik orang Aceh itu bernama *tari ratoh jaroe* dan bukan *tari saman*. Namun semuanya itu sudah terjadi, ibarat nasi telah menjadi bubur dan tidak mungkin lagi dikembalikan ke dalam wujud aslinya.

Salah satu penyebab mengapa orang Gayo hingga saat ini juga tidak ingin disebut sebagai orang Aceh baik secara kultural maupun secara sosial ditengah-tengah masyarakat Aceh sebagai satu kelompok etnik yang mayoritas. Oleh karena itulah, sebelum dilakukan pencatatan atas hak kekayaan warisan budaya suatu kelompok etnik, sebaiknya perlu dilakukan berbagai kajian terlebih dahulu agar tidak terjadi lagi silang sengketa atas hak warisan budayanya. Apalagi masyarakat yang terdapat di provinsi Aceh ini adalah masyarakat yang multietnis dan multibudaya, tentunya semua harus dapat diakomodir serta berhak untuk mendapatkan pelayanan yang sama.

#### *Revitalisasi Nilai-Nilai Pengajaran dalam produk Kebudayaan Aceh untuk Pemahaman Lintas Budaya*

Berbagai kajian tentang warisan budaya Aceh hingga saat ini tampaknya masih sangat sedikit sekali dilakukan baik melalui dialog kebudayaan, diskusi, seminar, maupun konferensi internasional. Hal ini terjadi karena masih banyak anggapan bahwa dialog ekonomi dan politik seolah-olah lebih penting daripada dialog kebudayaan. Tidak heran jika sistem nilai, norma-norma, serta cara pandang seseorang terhadap suatu kebermaknaan manusia juga selalu diukur dengan tingkat ekonomi dan jabatan yang dimiliki. Jabatan identik dengan kekuasaan, dan kekuasaan identik dengan kekayaan. Sebab dengan kekuasaan yang dimiliki akan mudah terjadi perilaku budaya yang manipulatif dan koruptif untuk dapat mengambil keuntungan material yang sebesar-besarnya. Oleh karena itulah tidak heran jika seseorang ingin memiliki jabatan, kekuasaan dan kekayaan, ia pun rela mengeluarkan uang lebih dahulu guna untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar di masa yang akan datang. Padahal budaya dan agama yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat Aceh sampai saat ini tidak pernah mengajarkan cara hidup seperti ini. Maknanya bahwa budaya Aceh adalah budaya yang berbasis pada syariah Islam, dimana implementasi nilai-nilai yang Islami menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat Aceh pada umumnya (Harun 2009)

Gambaran di atas, seolah-olah apa yang telah terjadi ditengah-tengah masyarakat Aceh hingga saat ini adalah masalah uang sebagai tujuan hidup dan sebagai cara memecahkan permasalahan hidup. Tidak disadari bahwa apa yang terjadi sejak Aceh didudukkan sebagai wilayah konflik justru apa yang terjadi seperti pembunuhan, dan berbagai kriminalitas lainnya, semuanya bermuara pada persoalan uang (*peng*) sebagai penyebab utama kejahatan, termasuk juga “kejahatan kerah putih” yang jumlahnya sedikit akan tetapi berdampak pada banyak orang. Disinilah perlu kita renungkan lebih jauh bahwa secara kultural orang Aceh sudah memiliki cara hidup tersendiri yang sudah direfleksikan melalui produk kebudayaannya, dan terimplementasi dalam bentuk kearifan lokal (*local wisdom*) sebagai cara dalam pemecahan masalah, dan bukan dengan “cara uang”.

Pintu Aceh sebagai contoh yang merupakan bagian dari rumah Aceh dan hingga saat ini tampaknya sudah menjadi identitas keAcehan yang terdapat pada berbagai tempat seperti gedung-gedung perkantoran misalnya, hingga sampai pada amplop undangan perkawinan, dan lain sebagainya. Rumah Aceh yang memiliki pintu Aceh yang kecil dan terlihat sempit bermakna bahwa bagi orang yang datang ke Aceh harus melalui pintu yang kecil dan agar dapat masuk kedalam rumah harus membungkukkan badannya dan kepalanya sebagai simbol bahwa kita sebagai tamu harus menghormati si pemilik rumah. Namun setelah kita masuk kedalam rumah akan terlihat lebar dan lapang sebab tidak ada penyekat seperti lemari, kursi, dan alat-alat perabotan lainnya. Artinya kita dapat duduk sama rendah, dan berdiri sama tinggi, serta tidak perlu pembeda melalui kursi jabatan dan kedudukan yang ada.

Setiap produk kebudayaan Aceh pada hakikatnya telah mengakomodir kebutuhan budaya mereka dengan fungsi kultural masing-masing. Dari mulai *tari ranup lampuan* misalnya bagaimana orang Aceh menyambut dan menghormati kedatangan para tamu. Selanjutnya orang Aceh adalah orang memiliki tradisi memuliakan tamu, dan inilah yang disebut dengan *tradisi peumulia jame'* dan seterusnya. Tidak heran jika Aceh juga disebut sebagai negeri seribu satu kenduri, mulai dari kenduri kelahiran, perkawinan, hingga kenduri kematian. Dengan kata lain bahwa dibalik semua produk kebudayaan Aceh adalah refleksi pengajaran tentang nilai-nilai yang perlu direvitalisasi dan dipahami tidak hanya bagi masyarakat Aceh, akan tetapi juga bagi masyarakat non Aceh sebagai upaya pemahaman lintas budaya.

#### *Pemahaman Lintas Budaya dalam Membangun Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal di Aceh*

Aceh adalah sebuah negeri modal dimana sumbangan Aceh terhadap berdirinya sebuah negara bangsa Indonesia sangat cukup besar. Namun semua kebaikan-kebaikan Aceh di negeri ini tidak tercatat didalam buku-buku sejarah nasional Indonesia (Alfian 2005). Sehingga yang tampak tentang Aceh saat ini hanyalah kemiskinan, wilayah konflik, serta berbagai ketergantungan Aceh pada sistem politik nasional. Ironisnya lagi, stereotip negatif tentang Aceh jumlahnya terus bertambah mulai dari *Aceh pungo*, hingga "rumput Aceh" dan lain sebagainya. Gambaran situasi dan kondisi seperti ini tentunya akan merugikan masyarakat Aceh khususnya dalam membangun kembali dunia pariwisata pasca konflik dan tsunami. Oleh karena itulah harus ada upaya menghilangkan stereotip negatif tentang Aceh melalui gerakan moral dan menjadikan Aceh sebagai negeri yang memiliki kekuatan moral (moral force).

Strategi menciptakan kembali Aceh sebagai *moral force* merupakan salah satu revitalisasi berbagai warisan budaya Aceh yang sarat dengan nilai-nilai pengajaran moral (moral teaching). Selanjutnya melakukan publikasi bahwa Aceh tidaklah seburuk seperti apa yang mereka bayangkan. Justru sebaliknya mereka dapat belajar bagaimana filosofi rumah Aceh misalnya, *ranup lampuan*, *saman Gayo*, dan berbagai kearifan lokal yang ada, serta dapat pula menikmati kopi Aceh dan berbagai kuliner Aceh lainnya yang sudah cukup populer di berbagai tempat lainnya. Untuk itulah perlu dibangun "pusat informasi pariwisata dan kajian budaya" (*center for tourism information and cultural studies*) guna mengakomodir berbagai persoalan budaya dan pariwisata di kabupaten Bireuen.

#### **KESIMPULAN**

Revitalisasi terhadap berbagai warisan budaya Aceh di kabupaten Bireuen disini adalah dalam rangka mengungkap kembali nilai-nilai keAcehan yang cenderung merefleksikan berbagai kearifan lokal yang perlu dilestarikan sebagai kekayaan budaya. Adanya nilai-nilai pengajaran dan pembelajaran didalam warisan budaya Aceh tentunya dapat dijadikan modal budaya yang sangat berguna dalam membangun sebuah kekuatan moral dan mengembalikan Aceh kedalam suatu negeri yang bermartabat dan beradab. Oleh karena itulah nilai-nilai itu perlu dipahami tidak hanya secara lokal, akan tetapi juga secara nasional dan global sebagai penguatan budaya Aceh dan juga sebagai upaya pemahaman budaya antar bangsa. Dengan kata lain bahwa revitalisasi warisan budaya Aceh adalah juga dalam rangka menjaga keseimbangan antara pembangunan budaya dan pembangunan ekonomi yang dalam hal ini dikaitkan dengan pembangunan pariwisata berbasis budaya. Semoga artikel penelitian ini dapat berguna untuk langkah-langkah selanjutnya.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Aceh yang telah memberikan dukungannya secara moril hingga artikel ini selesai dan dapat dipublikasi. Selanjutnya tidak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada *The Red Land Foundation*, sebuah NGO lokal di Bireuen Aceh yang selalu terbuka melakukan diskusi berkenaan dengan berbagai kajian Bahasa, Sastra, dan Warisan Budaya sebagai wujud dukungan morilnya yang sangat berguna. Semoga tulisan ini akan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfian, I. 2005. *Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah*. Gadjah Mada University Press. <https://books.google.co.id/books?id=-G0XAAAACAAJ>.
- Eriksen, Thomas Hylland. 2002. *Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives*. Pluto press.

- Haboddin, Muhtar. 2012. "Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal." *Journal of Government and Politics* 3(1): 109–26. <http://journal.umy.ac.id/index.php/jsp/article/view/152>.
- Harun, Mohd. 2009. *Memahami Orang Aceh*. Citapustaka Media Perintis.
- Ilhamsyah, Fadhil. 2018. *Gagasan Politik Muhammad Hasan Di Tiro Tentang Nasionalisme Aceh*.
- Ismail, Badruzzaman. 2008. *Sistem budaya adat Aceh dalam membangun kesejahteraan : nilai sejarah dan dinamika kekinian*.
- Meuleman, Johan H. 2005. "Review: Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia." *Journal of Islamic Studies* 16(2): 275–77. <https://doi.org/10.1093/jis/eti150>.
- Pirous, A D. 2005. *Aceh: Kembali Ke Masa Depan*. IKJ Press. <https://books.google.co.id/books?id=PbNwAAAAMAAJ>.
- Rosana, Ellya. 2015. "Modernisasi Dalam Perspektif Perubahan Sosial." *Al-AdYaN* 1.
- Sulistyaningtyas, Tri. 2007. "Bahasa, Masyarakat Dan Kekuasaan." *Jurnal Sosioteknologi* 6(12): 327–29.